

PROFESIONALISME APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA MENGATASI PATOLOGI PELAYANAN PUBLIK

Hamirul¹, Ariyanto.M², Nova Elsyra³
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo
Email : hrul@ymail.com¹

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bahwa profesionalitas ASN dapat mengatasi patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik, dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara dengan informan sebanyak 10 orang dan dihasilkan bahwa profesionalisme yang ada di pelayanan PUPR di kabupaen Tebo sudah cukup baik yakni meliputi: kemahiran, tanggung jawab, disiplin serta sikap pegawai sudah cukup, namun aspek kesiapan masih perlu pembenahan agar hal tersebut tidak merambat ke indikator lainnya terkait Profesionalisme aparatur dalam melayani kebutuhan masyarakat dan dengan profesionalisme yang diterapkan dalam pelayanan yang berkualitas sudah tentu dapat meminimalisir patologi yang ada dalam pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan profesionalitas dari ASN sebagai abdi masyarakat.

Kata Kunci: Profesionalisme, ASN, patologi, Patologi Birokrasi, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Di era reformasi ini, dibutuhkan penataan sumber daya aparatur yang professional dalam manajemen pemerintahan sehingga akan memberikan dampak pemerintahan yang lebih berkualitas, lebih mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial ekonomi. Pelaksanaan pembangunan di daerah tidak akan berjalan optimal jika aparatur pemerintah/pegawai tidak professional untuk melakukan visi misi pemerintahan. Kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah.

Hak atas pelayanan publik juga merupakan hak yang diakui secara mendunia sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Hak untuk mendapatkan pelayanan publik merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Hal tersebut merupakan bagian dari penciptaan *good governance*.

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan bagi masyarakat dan juga sebagai penanggungjawab dari fungsi pelayanan publik yang akan mengarahkan

tujuannya kepada *public service*, memikirkan dan mengupayakan tercapainya sasaran pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, menjadi suatu kewajiban para aparatur pemerintah untuk tetap mengadakan perbaikan berkaitan dengan kualitas pelayanan publik yang akan dihasilkan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dapat menentukan kualitas pelayanan dan masyarakat yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Aparatur yang memiliki kemampuan yang sejalan dengan kebutuhan tugas yang dilakukannya dalam bekerja merupakan syarat terciptanya aparatur yang profesional. Maksudnya kemampuan dan keahlian aparatur merupakan suatu pencerminan dari arah dan tujuan yang ingin dicapai sebuah organisasi. Dengan demikian, apabila organisasi tersebut ingin melayani masyarakat banyak untuk terciptanya *good governance*, maka organisasi perangkat daerah yang terkait haruslah memiliki aparat yang profesional demi tercapainya tujuan organisasi.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi profesionalisme ASN (baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Berbagai faktor ini saling berkelindan dan berkaitan. Seringkali dikatakan faktor penyebab rendahnya profesionalisme PNS adalah rendahnya gaji, tipe Kepemimpinan, Pengawasan dan lain sebagainya sehingga para pegawai berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui pekerjaan yang dilakukan dan menimbulkan kelalaian yang kurang mendapat pengawasan pada ASN tersebut.

Profesionalisme kinerja pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo menjadi pandangan masyarakat terhadap dampak pembangunan di wilayah kabupaten tebo. Hal ini berkaitan langsung dengan para pekerja pihak ketiga dalam suatu pembangunan, dan jika pegawai tersebut terus menerus tidak disiplin, tidak taat dengan aturan dan bekerja seenaknya saja maka pembangunan yang bertujuan memfasilitasi masyarakat dalam bentuk penyediaan infrastruktur di Kabupaten Tebo, akan berdampak buruk dan membuat kenyamanan masyarakat menjadi berkurang.

Dinas PUPR yang merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo, kehadirannya sangat memberi warna terhadap pelayanan publik. Dinas PUPR adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung-jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum. Pada konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan *self supporting*-nya organisasi daerah, Dinas PUPR mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pelayanan dari segi pembangunan infrastruktur di daerah. Infrastruktur yang baik dan lengkap, akan memperlancar perekonomian di daerah, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa identifikasi masalah yang terdapat di lokasi penelitian, adalah adanya beberapa oknum yang harus selalu mendapat pengawasan dari pimpinan untuk melakukan Disiplin.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Dalam metode deskriptif ini diarah kepada metode penelitian kualitatif yaitu merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan mahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Nonprobability Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi atau dipilih menjadi sampel. Teknik Nonprobability Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling (sampel bertujuan) dengan informan sebanyak 10 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profesionalisme ASN pada Dinas PUPR dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik telah melaksanakan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat di Kabupaten Tebo. Hal ini di tunjukkan pada hasil wawancara peneliti dengan Informan Penelitian yang menjadi Perwakilan dari 59 orang sebanyak 10 orang aparatur yang bekerja pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo.

Adapun hasil dari wawancara tentang identifikasi masalah pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo tercakup dalam Indikator-indikator Profesionalisme sebagai berikut : **Kemahiran.**

Kemahiran merupakan salah satu bagian penting dari Profesionalisme, kemahiran artinya kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, baik itu pekerjaan, menggunakan sarana prasana dan lainnya yang bersangkutan dengan bidang pekerjaan masing-masing dari orang tersebut. Kemahiran seseorang sangat diperhitungkan karena merupakan penentu waktu dan hasil pekerjaan yang dilakukan. Dari perhitungan berapa lama waktu pengerjaan dan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kita dapat menilai keahlian dan kemahiran orang tersebut dari hingga seberapa paham dia dengan pekerjaannya hingga seberapa ahli dia dibidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo yang menyatakan bahwa :

“...Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tentu Kemahiran ASN sangat erat kaitannya dengan kata Profesionalisme, aparat yang dimiliki harus mahir menggunakan sarana dan prasarana serta mahir dalam mengerjakan setiap mereka di emban tugas yang harus di selesaikan. sebab dengan tuntutan kemajuan zaman seperti pada saat ini, semua pekerjaan yang dilakukan tidak lepas dari bantuan yang berkaitan dengan teknologi, kita ambil saja satu contoh yaitu Komputer di zaman seperti saat ini semua pekerjaan tidak lepas dari benda tersebut, akan tetapi Dinas yang saya Pimpin sangat baik dalam

menggunakan komputer. Dengan memanfaatkan hal tersebut kami sangat tidak terbebani dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dari segi kemahiran yang ASN kami miliki pada saat ini.”¹

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Tebo mengatakan hal yang sama dengan Hendry Nora selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo, beliau mengatakan :

“...Saya setuju dengan pendapat Kepala Dinas kami yang mengatakan tentang Kemahiran ASN sangat erat kaitannya dengan kata Profesionalisme. Tingkat kemahiran ASN yang kami miliki tidak perlu kami jadikan beban guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, setiap saya di kantor saya selalu berkeliling dan melihat apa-apa saja yang dikerjakan oleh ASN dalam lingkup Dinas PUPR Kabupaten Tebo, semua berjalan lancar, tidak ada masalah dalam menggunakan sarana prasarana, maupun skill dan kemampuan mereka dalam mengerjakan apa saja yang telah diperintahkan.”²

Jawaban serupa diberikan oleh Ahmad Rony Kepala Bidang Sumber Daya Air yang mengatakan :

“...Kemahiran memang salah satu syarat untuk mendapatkan kata profesionalisme, jika saya menilai secara keseluruhan Aparatur yang bekerja pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo menyangkut kemahiran, saya tidak akan mengatakan tingkat kemahiran mereka buruk, alasan saya adalah ; setiap pekerjaan yang saya berikan kepada siapapun yang saya tunjuk dan saya percayai, orang tersebut langsung mengerjakannya dan menyelesaikannya tepat pada waktu yang saya minta.”³

Tidak jauh berbeda dari pendapat lain Sobirin Kepala Bidang Bina Marga juga mengatakan :

“...Masalah kemahiran saya tidak pernah meragukan orang-orang yang bekerja disini. Dari awal saya ditugaskan pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo Dinas ini mayoritasnya adalah orang-orang yang usianya terbilang Muda, anak muda yang bekerja disini cepat untuk memahami maksud dari pekerjaan yang ada pada Bidangnyanya masing-masing meskipun pada awalnya mereka belum mengetahui inti dari pekerjaan tersebut, setelah diberi penjelasan sedikit saja mereka langsung mengerjakannya dalam pola pikir sayang sama dengan orang yang memberi perintah, hal tersebut dilihat dari hasil pekerjaan/pelayanan yang telah mereka berikan saat waktu sudah menyelesaikannya.”

Sedangkan Sardi kepala Bidang Cipta Karya Dinas hanya memberi jawaban singkat dan berkata :

“...terkait aparat birokrasi sebenarnya masyarakat yang harus menilai hasil kerja ataupun hasil pelayanan yang kami berikan, kemahiran artinya seseorang tersebut harus bisa dan paham mengenai semua hal mengenai Ruang lingkup pekerjaan yang dia tempati, kalau tidak sesuai dengan Bidanganya kemahiran tersebut akan lama terwujud.”

Pada hari yang berbeda, Mustari Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi memberikan Jawaban yang hampir serupa dengan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Tebo, beliau mengatakan :

“...Bidang yang saya pimpin adalah bidang yang sangat krusial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dari proses administrasi hingga ke proses tahap pengerjaan pengadaan konstruksi. akan tetapi hal tersebut di imbangi oleh orang-orang yang tergolong mempunyai kemahiran yang tinggi, alasan saya mengatakan seperti itu adalah setiap adanya profosal pengajuan dari masyarakat ataupun program pengadaan konstruksi, kami selalu cepat dan tanggap mengerjakannya hingga sampai ke proses pelaporan.”

Jawaban yang sama diberikan oleh Asri Ketua RT 002 RW 005 Kelurahan Tebing Tinggi dengan Jawaban Zulkifli dan Jawaban Informan lainnya yang telah dituliskan dihalaman sebelumnya. Asri berkata sebagai berikut :

“...Mahir sama artinya dengan mempunyai kemampuan kerja yang baik. Tingkat kemahiran ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo tersebut sangat baik, pengalaman saya adalah diwaktu saya mengantar Proposal pengadaan jalan lingkungan pada daerah yang saya tempati, secara langsung saya melihat tidak ada satupun apartur disana yang bersantai-santai seblum jam Istirahat, mereka sibuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing, dan melaporkan pekerjaan yang telah diselesaikannya dalam waktu singkat kepada Atasan atau kepada Pimpinan Bidang dimana mereka ditempatkan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kemahiran ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo sudah Maksimal dan sangat baik. Aparat pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo mempunyai kemahiran yang baik dalam menggunakan sarana prasarana, skill dalam bekerja dan juga kemampuan mereka dalam memecahkan masalah yang ada disaat sedang bekerja. tidak adanya kekhawatiran para pimpinan terhadap indikator yang satu ini merupakan sebuah bukti langsung bahwa tidak adanya masalah yang berarti terkait kemahiran ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo.

Kesiapan

Aparatur yang siap melaksanakan tugas dan siap memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat tentu sangat dibutuhkan Kabupaten Tebo yang masih memiliki umur 18 Tahun berdiri semenjak pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo pada Tahun 1999.

Kesiapan ASN merupakan modal awal yang harus ada didalam diri aparatur yang bekerja untuk melayani masyarakat. seperti halnya niat untuk bekerja pada

masing-masing bidang yang di tempati oleh aparaturnya tersebut. Jika aparaturnya tidak mempunyai kesiapan untuk melayani masyarakat maka pelayanan yang diterapkan tidak akan membuahkan hasil yang baik meskipun aparaturnya tersebut memiliki kemahiran yang terbilang baik.

Hendry Nora selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo memberikan jawaban terhadap kesiapan ASN yang bekerja disana, Hendry Nora mengatakan :

“...Kesiapan ASN dalam bekerja serta melayani masyarakat adalah tuntutan yang harus di lakukan, dengan kata lain jika ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo ini tidak siap untuk itu, maka lebih baik cari lah pekerjaan lain untuk melanjutkan karir masing-masing. masyarakat yang butuh dilayani dengan cepat dan tepat tidak akan menerima dan akan lebih memilih memberikan komentar buruk jika kesiapan tersebut tidak ada pada ASN disini. berhubungan dengan itu, saya belum ada mendapat komplain ataupun kritik dari masyarakat mengenai pelayanan yang kami berikan, saya tidak memberi penilaian terhadap bawahan saya, cukup masyarakat saja yang memberikan penilaian tersebut.”

Jawaban yang diberikan Septiansyah sebagai sekretaris yang tegas akan bawahannya merupakan dampak yang baik untuk setiap diri ASN yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo, sebab kesiapan para ASN memang seharusnya dituntut oleh setiap atasan untuk kebaikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Tebo. Septiansyah mengatakan bahwa :

“...Jika ASN disini tidak siap untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan, maka saya anggap itu suatu permintaan pindah tugas secara tidak langsung untuk dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.”

Jawaban yang Sedikit berbeda diberikan oleh Ahmad Rony Kepala Bidang Sumber Daya Air terhadap Bidang Cipta Karya yang dipimpin oleh Sardi. Beliau mengatakan :

“...Bicara mengenai kesiapan saya sangat prihatin dengan orang-orang yang ada di bidang cipta karya, terkadang kepala Bidangnya sedikit bercerita kepada saya disaat waktu kosong, isi cerita kami mengenai lambatnya penyelesaian pekerjaan yang dikerjakan, contohnya saja membuat surat, padahal Konsep dari surat tersebut sudah dibuat oleh kepala Bidang yaitu Sardi, tetapi aparaturnya yang ada di ruangnya terlalu banyak mengundur-undur waktu untuk hanya sebuah surat saja, hal ini jelas menjadi ganjalan untuk saya, Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang lainnya. karena saya takut ini akan menjadi contoh buruk untuk pegawai yang bekerja di Dinas PUPR ini, lain lagi ceritanya dengan diruangan saya, mungkin yang agak takut dan segan dengan watak saya yang agak keras diwaktu saya ada didalam ruangan.”

Sobirin Kepala Bidang Bina Marga memberikan jawaban yang menerangkan tentang kesiapan orang-orang di Bidanganya saja. Sobirin mengatakan sebagai berikut :

“...ASN yang ada pada Bidang yang saya pimpin sudah dari awal saya tuntut untuk hal ini, jika tidak siap, maka silahkan minta kepada Kepala Dinas untuk di pindahkan setidaknya ke Bidang yang lain, jika hanya saya yang mempunyai kesiapan untuk bekerja dan melayani masyarakat dalam bidang saya ini, maka Bidang ini tidak akan berjalan seperti apa yang saya dan Kepala Dinas kehendaki.”

Sardi selaku Kepala Bidang Cipta Karya memberikan Jawaban hampir serupa dengan Ahmad Rony Selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air, beliau memberikan jawaban mengenai ASN di ruangannya yang mengatakan :

“disetiap apel pagi dan rapat evaluasi bulanan kami selalu membahas masalah siap atau tidak ASN disini untuk melaksanakan kewajibannya melayani masyarakat terkadang terdapat oknum pegawai yang sedikit bermalasan-malasan ketika saya perintahkan untuk mengerjakan sesuatu, mungkin hal tersebut sebabkan cara saya memberikan tugas tersebut dengan cara yang terlalu lembut, meskipun hal tersebut tetap dikerjakan, tetapi saya rasa untuk perihal yang sedikit saja penyelesaiannya terbilang lama jika dihitung dengan waktu.”

Dari hasil wawancara mengenai Kesiapan ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo, terdapat delapan jawaban yang berbeda-beda, satu jawaban tidak dituliskan dengan alasan direduksi sebab informan tersebut mengaku tidak banyak mengetahui tentang Dinas PUPR Kabupaten Tebo jika menyangkut dengan Kesiapan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat dua jawaban yang mengganjal terhadap kesiapan yang dimiliki ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo, Jawaban tersebut mengarah kepada Bidang Cipta Karya yang sama-sama menilai kurangnya kesiapan pada Bidang tersebut dalam memulai pekerjaan setiap diperintahkan Kepala Bidanganya. Ini artinya kesiapan ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo perlu ditingkatkan lagi khususnya pada Bidang Cipta Karya yang mendapat dua jawaban negatif terdiri dari jawaban Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Kepala Bidang Cipta Karya itu sendiri. Perlunya Khursus Singkat/pelatihan untuk oknum ASN yang bekerja disana agar kemapanaan diri dan pemikiran tidak lagi menjadi permasalahan kesiapan yang akan mengganggu indikator lainnya pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo.

Tanggung Jawab.

Dalam Prinsip *Good Governance* Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat harus bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Begitu pula dengan Aparatur Sipil Negara yang harus bertanggung jawab pada pekerjaan yang mereka lakukan, hal ini juga sangat menentukan profesionalitas

aparatur birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan jawaban dari Hendry Nora yang menanggapi pertanyaan peneliti tentang tanggung jawab ASN pada pekerjaan yang di percayakan kepada mereka untuk diselesaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Hendry Nora mengatakan :

“...Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4 pada huruf h menyebutkan bahwa mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. ini artinya harus ada dalam setiap diri pegawai yang ada di seluruh daerah indonesia. Setiap Apel pagi saya selalu memberikan arahan kepada Aparat disini untuk menjadikan tanggung jawab seperti hoby, tujuan saya adalah agar ASN tidak merasakan terbebani dengan hal tersebut. tanggung jawab bukan lah sebuah masalah besar pada Dinas ini dan sayapun tidak pernah terlalu mengkhawatirkan ketiadaan rasa tanggung jawab tersebut sampai saat ini.”

Ahmad Rony kembali mempertegas kedua jawaban diatas, bahwa ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo harus memiliki Sikap Tanggung Jawab dalam bekerja dan melayani masyarakat, selengkapnya beliau berkata :

“...Tanggung jawab sangat penting kehadirannya dalam tiap OPD, jika ASN yang bekerja tidak bertanggungjawab, dari hal itu saja masyarakat sudah bisa menilai kami bahwa setiap hal yang kami lakukan tidak akan membawa kebaikan untuk Kabupaten Tebo ini. Jujur saya tidak terlalu takut akan hal ini, sebab saya sudah lama bekerja disini, dan saya cukup mengetahui sifat pegawai yang ada pada Dinas PUPR kabupaten Tebo ini. mereka menyelesaikan pekerjaan yang diberikan hingga sampai pekerjaan tersebut memang sudah di anggap benar.”

Sobirin memberikan pendapat tentang seberapa pentingnya tanggung jawab dari sudut pandangnya, Sobirin mengatakan sebagai berikut :

“...Bagi saya tanggung jawab adalah hal pertama yang harus dipentingkan, karena jika pegawai disini sudah bisa berdisiplin, maka rasa tanggung jawab akan mengikuti dengan sendirinya. Tidak perlu panjang lebar membahas ini, karena saya merasa ASN yang siap untuk bekerja disini berarti mereka siap untuk bertanggungjawab untuk semua yang dikerjakannya.”

Mardianis mengaku tidak adanya masalah pada pertanggungjawaban yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Tebo, Mardianis mengatakan :

“...Rasa tanggungjawab memang penting untuk terwujudnya profesionalisme jika ditanyakan tentang ini pada Dinas kami, saya rasa tidak ada yang mengganjal, setiap saya memperhatikan aparat yang sedang bekerja, saya melihat mereka mengerjakannya hingga pekerjaan tersebut selesai, kamipun begitu, setiap masyarakat yang datang kami selalu berusaha untuk bertanggungjawab pada orang tersebut hingga mereka menyelesaikan kepentingan dengan Dinas PUPR Kabupaten Tebo ini.”

Dari hasil wawancara tentang Tanggung Jawab ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran ASN akan pentingnya tanggung jawab pada diri mereka masing-masing telah memberikan dampak yang baik terhadap kinerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Tebo. Hal ini ditandai dengan komentar positif yang diberikan oleh setiap orang yang menjadi sampel penelitian terhadap kehadiran Tanggung Jawab yang telah ada pada diri aparatur di Dinas PUPR Kabupaten Tebo.

Kesadaran ASN akan tanggungjawab yang harus dijaga meskipun saat pimpinan sedang melakukan perjalanan Dinas tidak menjadi kendala, karena adanya pendelegasian wewenang yang dilakukan pimpinan kepada bawahannya untuk melakukan pengawasan terhadap semua ASN yang berada pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo.

Disiplin.

Disiplin merupakan hal yang krusial menjadi masalah pada tiap OPD yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah, disiplin juga sangat menjadi sorotan para pimpinan tiap organisasi dalam mengevaluasi ASN yang bekerja disana. Disiplin dalam bentuk Kehadiran yang terdiri dari ketepatan waktu saat datang bekerja dan kembali setelah bekerja. tidak hanya itu saja, disiplin dalam berpakaian juga menjadi pembahasan oleh para pimpinan pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo.

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk mentaati sebuah peraturan yang telah ditetapkan.

Hendry Nora yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo, menjelaskan disiplin yang dimiliki oleh ASN yang bekerja pada Dinas yang sedang beliau pimpin :

“...Bicara tentang disiplin, pada Dinas yang saya Pimpin ini tidaklah menjadi masalah bagi saya, dari semenjak awal saya tugas di sini, semua Aparat yang bekerja sampai saat ini memberikan kontribusi yang baik dalam berdisiplin dari semenjak itu pula saya menambahkan tipe kepemimpinan yang tegas, agar setiap aparat yang bekerja disini tidak melakukan hal yang bersifat menyimpang, artinya tidak hanya faktor dari diri mereka saja yang membuat disiplinnya tetap terjaga, tetapi tipe kepemimpinan dari saya, Sekretaris, dan Kepala Bidang yang berada diluar dari faktor internal juga sangat mempengaruhi Disiplin orang-orang yang memberikan pelayanan publik pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo ini.”

Ahmad Roni Kepala Bidang Sumber Daya Air mengaku bahwa beliau sering memberi arahan setiap Apel Pagi pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo, beliau juga mengatakan :

“...Hal yang selalu saya perhatikan adalah disiplin ASN untuk datang tepat waktu dan disiplin mereka dalam berpakaian, apel pagi yang kami lakukan memang tidak selalu hadir semua, ada yang dalam perjalanan dinas, izin, sakit, cuti, tetapi tidak ada yang keterangannya Alpa atau tanpa keterangan, begitu pula dengan berpakaian, semua mentaati peraturan yang telah di

tetapkan dari segi berpakaian berpakaian, bagi saya ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo ini, telah maksimal dalam disiplin tepat waktu dan disiplin berpakaian.”

Sobirin Kepala Bidang Bina Marga Memberikan sebuah jawaban yang sependapat dengan yang lainnya, beliau berkata :

“...Memberikan kontribusi disiplin adalah hal yang penting untuk awal pekerjaan dalam sebuah OPD, jika ASN sudah sangat disiplin dalam hal apapun, maka semua pekerjaan yang dikerjakan akan sangat ringan untuk dikerjakan. Pada Dinas PUPR ini, semua sangat membanggakan dalam disiplin saya bisa memberikan kritikan pada ASN yang ada disini mengenai disiplin, karna semuanya sudah sangat maksimal.”

Sardi menganggap tidak adanya masalah Disiplin pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo, selengkapnya sardi mengatakan dan menyarakan untuk melihat Rekap Absen Kehadiran dua Bulan terakhir dari waktu penelitian, beliau mengatakan :

“...Disiplin memang sangat krusial dalam tiap OPD di Kabupaten Tebo untuk mencapai Profesionalisme akan tetapi jika anda melihat rekap absen apel pagi, apel sore dan absen kehadiran pada Dinas ini, anda akan tau betapa dinas ini tidak memiliki masalah dalam hal kehadiran dan ketepatan waktu, disiplin berpakaian dan dalam melakukan pekerjaan sekalipun, ASN yang bekerja disini sangat tau rasa malu jika mereka tidak disiplin dalam hal apapun sebab, ada banyak orang yang menilai jika itu mengenai Disiplin.”

Dilanjutkan dengan Mardianis yang menerangkan mengenai Rekap Absen bulanan yang beliau kerjakan, Mardianis mengatakan bahwa :

“...Disiplin adalah hal yang selalu ditekankan oleh Kepala Dinas, Disiplin Kehadiran, apel pagi, apel sore, berpakaian serta dalam melakukan Monitoring Evaluasi pada Pekerjaan pembangunan yang sedang berjalan. Rekap Absen yang saya kerjakan tidak pernah saya rekayasa, hal ini memang tidak bisa saya rekayasa, karena pada setiap pagi sebelum melaksanakan apel, para pegawai termasuk Sekretaris dan Kepala Bidang langsung mengisi absen yang terdiri dari absen harian dan absen bulanan, hal ini dilakukan untuk menanggulangi kekeliruan dalam merekap absen yang setiap akhir bulannya saya kerjakan, sayapun tidak punya keberanian untuk merekayasa absen yang telah di isi terlebih dahulu orang ASN pada tempat saya bekerja.

Pendapat yang sama pula diberikan oleh bawahan Zulkifli, yakni Asri selaku Ketua RT 002 RW 005 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. Beliau mengatakan :

“...Profesionalitas ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo mengenai disiplin tidaklah buruk, ASN disana ada saat mereka dibutuhkan, berpakaian rapi mengikuti aturan, dan bekerja diwaktu adanya pekerjaan, diwaktu ada tamu mereka langsung menyambut tamu tersebut dengan ramah dan sewajarnya.

tidak ada yang mengganjal, saya tidak mempermasalahkan Disiplin mereka sedikitpun.”

Berdasarkan data Rekap absen bulan Maret yang memiliki 21 (dua puluh satu) hari kerja terdapat pegawai yang memiliki kehadiran dikantor hanya 9 (sembilan) hari saja, yaitu Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, keterangan yang dimilikinya adalah 12 (dua belas) hari Dinas Luar Daerah sekaligus Dinas Dalam Daerah. Hal ini tidak menjadi masalah dalam sebuah absensi kehadiran pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo, sebab pegawai yang melakukan perjalanan Dinas luar maupun dalam Daerah dihitung tetap hadir dalam kegiatan kerja karna hal tersebut merupakan tugas yang harus diselesaikan bukan dikantor contohnya; (1) Koordinasi dan Konsultasi. (2) Monitoring Evaluasi Pekerjaan. (3) Study Banding. (4) Survei Wilayah Pembangunan. (5) Dan lain sebagainya.

Pada bulan yang sama terdapat salah satu ASN yang melakukan Cuti Tahunan, yaitu 10 (sepuluh), hal inipun juga tidak patut dipermasalahkan, sebab surat izin cuti yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo. Artinya Kepala Dinas memberikan atau mengizinkan orang tersebut untuk melakukan cuti yang diajukan.

Rekap Absen bulan April, sama halnya dengan bulan maret tidak ada permasalahan yang bisa diambil untuk diperbincangkan. Setiap pegawai yang tidak hadir pada hari kerja memiliki keterangan pada umumnya yaitu Dinas, Izin, Sakit, dan Cuti saja. tidak adanya Aparat yang memiliki keterangan Alpa pada bulan april tersebut.

Begitu pula dengan Rekap Absen bulan mei yang ikut dilampirkan pada lampiran Dokumentasi. Pada bulan mei tersebut Absen dipenuhi dengan keterangan Dinas, baik Dinas Luar Daerah maupun Dinas Dalam Daerah. Hal tersebut disebabkan adanya kepentingan kantor yang harus diselesaikan diluar lingkungan kantor, jika Kepala Dinas yang melakukan perjalanan Dinas tersebut artinya beliau diperintahkan secara langsung oleh Bupati, Wakil Bupati ataupun Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo. Ketiga orang tersebutlah yang memiliki wewenang untuk menanda tangani Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tebo jika melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan bagi ASN yang memiliki Status sebagai bawahan dari kepala Dinas, ASN tersebut diperintahkan langsung oleh Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang untuk melakukan perjalanan dinas luar daerah maupun dalam daerah, serta Kepala Dinas yang berhak menanda tangani SPT Aparatur Sipil Negara tersebut. (Data Rekap Absen tiga bulan terakhir terlampir pada Lampiran Dokumentasi).

Berlandaskan Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo pada Lampiran dijelaskan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kehadiran serta Jumlah Potongan Perhari yang tercantum pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1
Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

No	Komponen	Jumlah Potongan Perhari
1	Tidak Hadir Kerja tanpa Keterangan	100%
2	Tidak Hadir Kerja dengan Pemberitahuan Kepada Atasan Langsung	50%
3	Terlambat datang/tidak Apel Pagi	20%
4	Cepat Pulang/CP (tidak Apel Sore)	20%
5	Sakit tanpa Pemberitahuan (STP)	40%
6	Sakit dengan Pemberitahuan > 2 hari tanpa Surat Keterangan Dokter (STK)	40%
7	Sakit dengan Keterangan Dokter > 14 hari (SKD > 14)	20%
8	Tugas Belajar (TB)	Tidak Dibayarkan
9	Tugas Belajar sudah habis Masa Berlakunya (TBHB)	Tidak Dibayarkan
10	Dinas	Dibayarkan Penuh
11	Izin tidak masuk kantor alasan penting (ITMKAP)	Dibayarkan Penuh
12	Izin terlambat datang alasan Dinas (ITD AD)	Dibayarkan Penuh
13	Izin terlambat datang alasan Sosial (ITD AS)	Dibayarkan Penuh
14	Izin Cepat Pulang alasan Dinas (ICP AD)	Dibayarkan Penuh
15	Izin Cepat Pulang alasan Sosial (ICP AS)	Dibayarkan Penuh
16	Izin Cepat Pulang Undangan Resmi (ICP UR)	Dibayarkan Penuh
17	Sakit lebih 14 hari dengan izin cuti (S>14 HR DIC)	Tidak Dibayarkan
18	Cuti	Tidak Dibayarkan
19	Tidak Hadir pada hari pertama tanpa keterangan setelah cuti bersama	Potongan 25% dari penerimaan Bulanan

Sumber : Buku Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2018

dari hasil wawancara dan Hasil rekapan Absen yang tercantum pada halaman sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya masalah yang begitu berarti mengenai disiplin ketepatan waktu datang dan keluar dari kantor dalam arti jam usai bekerja, mengenai disiplin berpakaian Aparatur Sipil Negara pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo telah mengikuti Aturan yang Ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tebo, tidak hanya itu saja dari jawaban positif mengenai Disiplin dalam bekerja ataupun menyelesaikan pekerjaan yang diperintahkan, aparat pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo telah maksimal melengkapi bagian tersebut untuk tercapainya Profesionalisme guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sikap Pegawai.

Identifikasi Permasalahan yang terakhir pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo mengenai Profesionalisme ASN adalah sikap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada publik. kesopanan, keramahan, dan cara pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu sangat krusial dan sangat diperhitungkan oleh masyarakat yang di layani.

Sikap pegawai yang lebih dipandang dari sudut tata krama menjadikan ini sebagai hal yang paling mudah dilihat saat melayani masyarakat yang datang dengan urusan tertentu, penilaian yang lebih berorientasi pada masyarakat, tatakrama merupakan yang paling sering mendapat komplain dari masyarakat yang dilayani. ASN yang bekerja pada OPD memiliki fungsi pelayanan masing-masing menurut OPD tempat Aparat tersebut bekerja, akan tetapi hal itu tidak membedakan cara dari suatu pelayanan yang harus didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Hendry Nora mengenai Sikap Pegawai yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo, Hendry Nora menjelaskan :

“...Sikap pegawai merupakan bagian krusial dalam melayani masyarakat dan untuk mendapat kata profesionalisme, tentu kami harus ikut andil dalam hal tersebut, tidak hanya bawahan saya saja, sayapun jika berhadapan dengan masyarakat saya harus memberikan keramahan, sopan dan santun kepada mereka, karna kami merupakan pelayan dari masyarakat, jika kami tidak menetapkan hel tersebut pada diri kami, kecaman buruk dari masyarakat adalah mereka lah yang melayani kami, hal ini jelas menjadi suatu hal memalukan, karna kami diberikan gaji dan tunjangan dimaksudkan adalah kami yang memang harus melayani masyarakat yang memiliki kepentingan dengan Dinas yang saya Pimpin.”

Sekretaris Dinas yaitu Septiansyah sangat setuju dengan apa yang di katakan oleh Kepala Dinas mengenai sikap pegawai. Septiansyah mengatakan :

“...Jika kepala Dinas sadar akan pentingnya sikap pegawai, maka kamipun harus ikut sadar dalam bersikap kepada masyarakat, untuk menjadi profesional semua ASN disini diwajibkan untuk memberikan sikap sebaik mungkin kepada Masyarakat, karena kami juga merupakan sebuah organisasi yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada mereka.”

Ahmad Rony yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air memberikan contoh dengan sikap yang beliau berikan kepada setiap tamu yang berkepentingan dengannya, Ahmad Rony menyebutkan :

“...Kepada setiap tamu yang datang dan menemui saya untuk kepentingan tertentu saya selalu memesankan untuk melaporkan kepada saya jika ada yang bersikap tidak wajar kepada mereka. Karna dengan begitu kami akan tau dimana kekurangan kami dalam melayani tamu ataupun masyarakat yang datang, sejauh ini tidak ada yang melaporkan hal tersebut, karna mungkin

kesadaran ASN yang ada disini sudah ada dalam melayani publik yang memang seharusnya mendapatkan hal tersebut.”

Sardi Kepala Bidang Cipta Karya mengungkapkan keramahan yang dimiliki Dinas PUPR Kabupaten Tebo dalam melayani masyarakat yang datang dalam jawaban yang dia berikan kepada pewawancara yakni :

“sikap pegawai yang sedang dibicarakan memang sangat penting untuk di bahas mengenai profesionalisme, apartur yang bekerja disini jika saya perhatikan selalu ramah melayani orang-orang yang datang, tidak mempedulikan derajat dan status, semua diberikan sikap dengan sebaik mungkin, karna memang tidak adanya perbedaan apapun jika itu tentang melayani masyarakat yang membutuhkan kami untuk meningkatkan segala hal yang terkait dari apa yang kami berikan.”

Mustari Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi memberikan jawaban sekaligus contoh yang sama dengan yang dilakukan Ahmad Rony Kepala Bidang Sumber Daya Air :

“...Sikap pegawai merupakan hal yang selalu saya sadari setiap saya berhadapan dengan masyarakat, untuk kebaikan dalam artikata profesionalisme maupun dalam artikata melayani masyarakat yang membutuhkan kami. saya dan kepala dinas sering turun kelapangan untung meninjau pekerjaan yang sedang berjalan, tiap kami bertemu masyarakat kami selalu menjawab pertanyaan yang mereka ajukan dengan sikap sebaik mungkin, jika tidak, kami semua yang ada pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo akan dinilai buruk, bagaimana tidak, publik akan berpikir bahwa; pimpinannya saja tidak memiliki keramahan apalagi bawahannya.”

Menurut Zulkifli Ketua RW.005 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah yang sempat mendapat pelayanan dari Dinas PUPR Kabupaten Tebo karna sempat mengajukan Proposal pembangunan Jalan Lingkungan sepanjang 148 meter di daerahnya dalam rangka meningkatkan pembangunan lingkungan di daerah Kabupaten Tebo. Beliau memberikan komentar Positif pada Pelayanan yang di berikan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tebo, Zulkifli mengatakan bahwa :

“...Hal yang kami dapatkan dari segi pelayanan Administrasi yang diberikan oleh Aparatur di Dinas PUPR Kabupaten Tebo tersebut bagi saya sangatlah maksimal, keramahan dan kesopanan mereka sangatlah membuat saya nyaman, jalan yang dibangunpun jika hanya dilewati kendaraan roda 2 dan roda empat akan tahan dalam kisaran waktu 3 – 4 tahun kedepan. meskipun itu hanya proyek kecil-kecilan, intinya hal itu bisa dimanfaatkan masyarakat yang jelas untuk meningkatkan pertumbuhan Perekonomian dan Kenyamanan serta Keamanan bagi penduduk serta orang-orang lain yang datang masuk ke desa yang kami tempati.”

Sikap Pegawai pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo sudah sangat baik dalam melayani masyarakat, hal ini ditandai dengan 2 jawaban Positif yang di berikan oleh Zulkifli dan Asri selaku Tokoh Masyarakat pada RW 005 Kelurahan Tebing Tinggi yang dengan jujur mengatakan hasil pelayanan dari ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo sudah sangat Maksimal. Terlepas dari hal tersebut, saran yang diberikan oleh Zulkifli benar adanya, bahwa Dinas PUPR Kabupaten Tebo jangan hanya membangun apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tebo, Dinas PUPR Kabupaten Tebo juga perlu melakukan perawatan kepada apa yang telah mereka bangun tersebut, hal itu sangat berguna untuk membantu ketahanan dari kualitas pembangunan, keamanan masyarakat yang menggunakan serta kenyamanan bagi orang-orang di Kabupaten Tebo.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Profesionalisme ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo sudah Maksimal dan sangat baik dan hal ini dapat meminimalisir patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Akan tetapi perlu ditingkatkan lagi pada aspek Sumber Daya Manusia, Disiplin ASN, dan *Follow Up* terhadap usulan yang masuk ke Dinas PUPR Kabupaten Tebo. Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka akan adanya dampak kepada indikator lainnya yang akan ikut terpengaruh karena minimnya hal tersebut diatas yang dimiliki oleh oknum-oknum pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo.

faktor eksternal yang ikut berperan dalam Profesionalitas ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo yaitu tipe kepemimpinan dari sebuah organisasi tersebut. Ketegasan dan kewibawaan pimpinan sangat berpengaruh sangat berpengaruh kepada Profesionalisme ASN dalam bekerja sehari-hari pada sebuah organisasi. Meskipun begitu, profesionalitas pegawai tetaplah menjadi kebutuhan utama untuk menunjang setiap kebutuhan serta pelayanan yang diberikn kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tebo.

KESIMPULAN

Profesionalisme ASN pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo dalam bekerja ataupun melayani publik sudah baik namun belum maksimal, pada aspek Kesiapan perlunya pembenahan agar hal tersebut tidak merambat ke indikator lainnya terkait Profesionalisme aparatur dalam melayani kebutuhan masyarakat dan dengan profesionalisme yang diterapkan dalam pelayanan yang berkualitas sudah tentu dapat meminimalisir patologi yang ada dalam pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan profesionalitas dari ASN sebagai abdi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamirul. (2016). Patologi dalam pelayanan publik karena persepsi dan gaya manajerial di kantor pertanahan Kota Cimahi. *Seminar Nasional II Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*. Padang: Universitas Andalas.
- Hamirul. (2017). Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku Birokrat yang bersifat disfungsional. *Otoritas*, 14-18.
- Hamirul. (2018). Patologi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0. *Tata Sejuta*, 1-16.

- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasan, I. (2010). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasolong, H. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfa Beta.
- Prasetyo, L. A. (2014). *Metode Penelitian Sosial*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfa Beta.
- Thoha (2001), *Perilaku Organisasi: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tjiptono, A. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI.
- Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 (1) tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Kepmenpan 63 tahun 2003 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.
- Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.